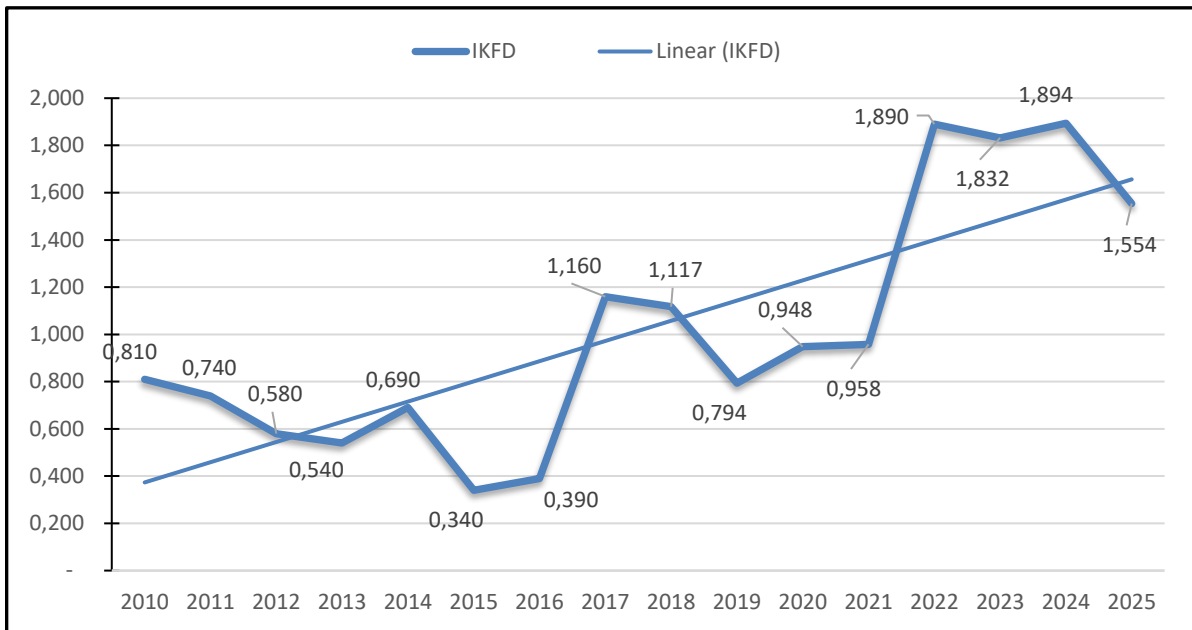




Gambar 3.1

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target kinerja kapasitas fiskal daerah yang tertuang dalam dokumen jangka menengah RPJMD tahun 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,28. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 1,554 dengan capaian sebesar 68,15 %

Tabel 3.4

Target dan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,554	2,28	68,15

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel

Kondisi ketercapaian kinerja indeks kapasitas fiskal daerah tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan tingkat kemajuan sebesar 68,15 %, masih membutuhkan dukungan kinerja sebesar 31,85 % yang akan dicapai pada selama tahun 2026 – 2030.

Dibandingkan dengan periode Renstra tahun 2019 – 2024 (sebelumnya), kondisi indeks kapasitas fiskal daerah turun dari 1,894 menjadi 1,554 atau turun sebesar 17,95 %, hal ini disebabkan karena perubahan regulasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

- 3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada) Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah pada 10 provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

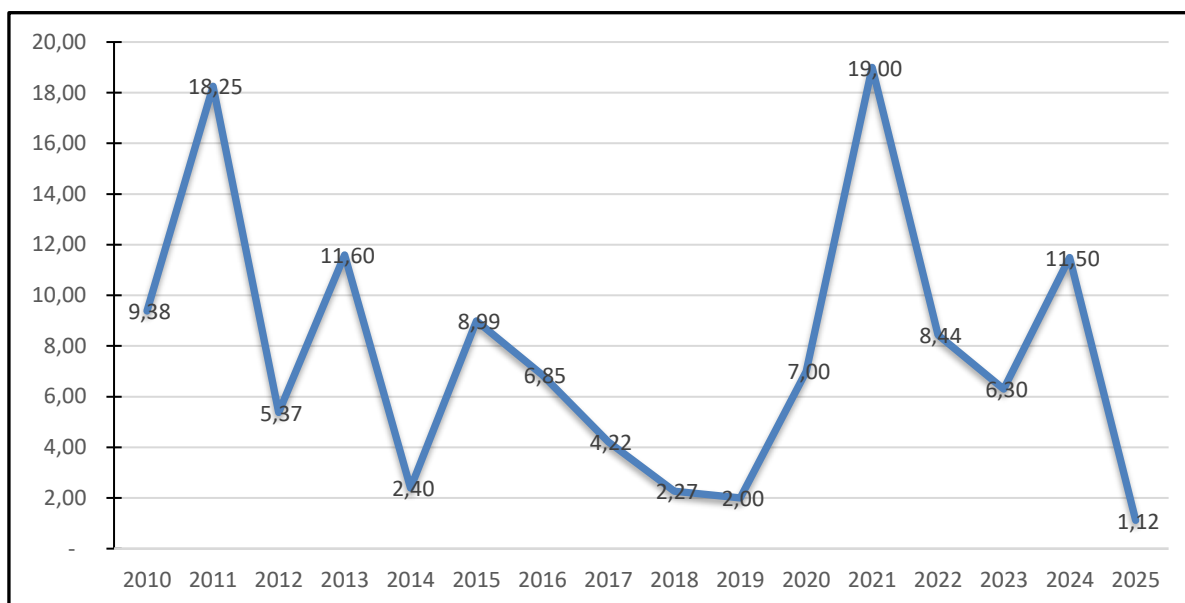
Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional

No.	Provinsi Pulau Sumatera	Kinerja Tahun 2025	
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	Provinsi Aceh	0,849	Sangat Rendah
2.	Provinsi Sumatera Utara	2,351	Tinggi
3.	Provinsi Sumatera Barat	1,151	Rendah
4.	Provinsi Riau	2,074	Sedang
5.	Provinsi Jambi	1,542	Rendah
6.	Provinsi Sumatera Selatan	1,554	Sedang
7.	Provinsi Bengkulu	1,227	Rendah
8.	Provinsi Lampung	1,671	Sedang
9.	Provinsi Kepulauan Riau	1,432	Rendah
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,651	Rendah

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Posisi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Pulau Sumatera berada pada peringkat 3 (tiga) tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.



Gambar 3.4
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD Terhadap 2025 Dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 Realisasi kinerja IKSS.1 tahun 2025 sebesar 1,1187 dan terhadap target jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 target kinerja IKSS.1 ini sebesar 8,51. Terhadap target jangka menengah bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 13,146 %.

Tabel 3.13
Perhitungan Capaian Data Kinerja IKSS 1 Terhadap Target Realisasi

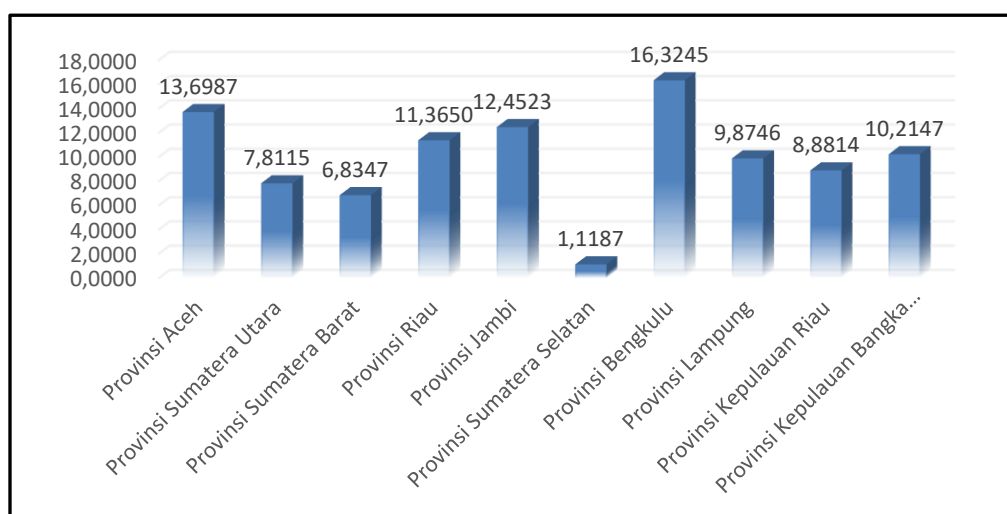
No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	1,1187	8,51	13,146

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Kinerja indikator *revenue mobilization*, apabila dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra tahun 2025 – 2029 mencapai tingkat kemajuan 13,146 %, kondisi ini harus

dikendalikan untuk tetap terjaga pada garis normal yang diharapkan sehingga deviasi yang diharapkan semakin rendah untuk meningkatkan kredibilitas pendapatan asli daerah pada kondisi perencanaan awal

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi:

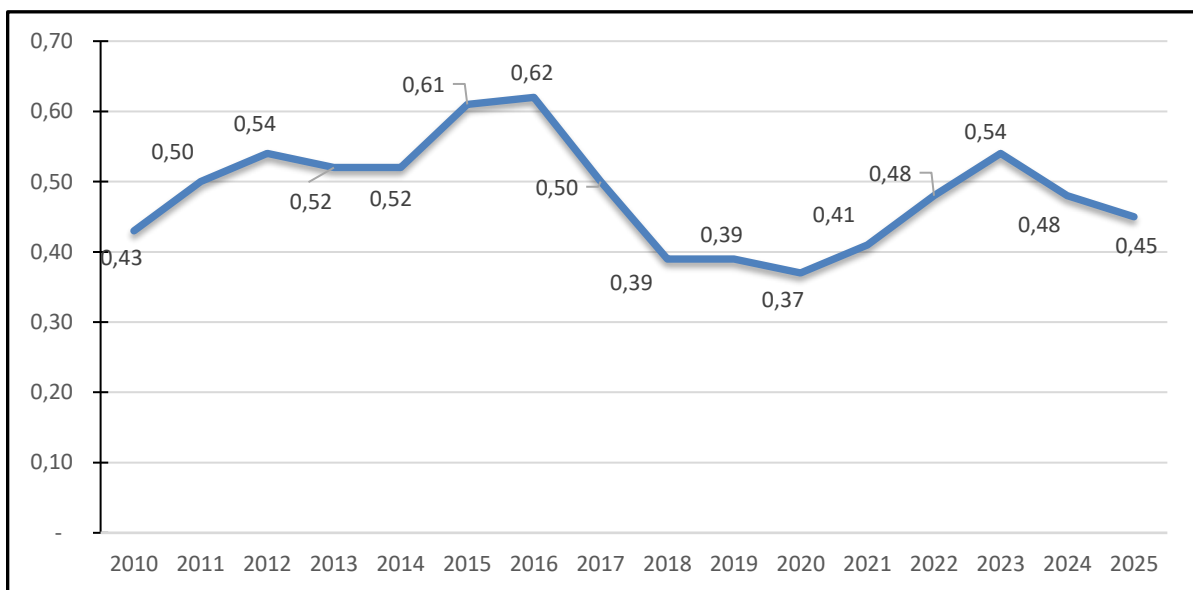


Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Nilai deviasi terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,1187 dan nilai deviasi tertinggi pada Provinsi Bengkulu dengan nilai deviasi sebesar 16,3245. Kondisi kredibilitas *revenue mobilization* pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi atau deviasi yang menjauh dari garis normal karena perubahan regulasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

Dimana pencatatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat pada akun Pemerintah Provinsi dan langsung diterima oleh rekening RKUD Kabupaten/Kota secara real time payment pada saat wajib pajak membayar pajak.

Secara rerata, kondisi indeks kemandirian fiskal daerah Sumatera Selatan selama periode 2010 – 2025, perkembangan indeks kemandirian fiskal daerah hanya mencapai 48,00 %, Provinsi Sumatera Selatan masih sangat bergantung pada dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat sebesar 52,00 %. Indeks kemandirian fiskal daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 62,00 % dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 37,00 %, hal ini dikarenakan dampak kontraksi dari Covid-19.



Gambar 3.6
Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

Trend tertinggi kemandirian fiskal Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2016 dengan nilai IKF sebesar 0,62 dan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai IKF sebesar 0,37.

- 3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 Realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

Tabel 3.22

Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2025 dan Target RPJMD

No.	Uraian	Kemandirian Fiskal		Capaian Kinerja
		Realisasi 2025	Target RPJMD 2030	
1.	IKF	0,478	0,520	91,923 %
2.	Pendapatan	9.427.430.159.702,67	13.549.281.593.204,80	0,520
3.	TKD	4.918.233.084.557,00	6.468.639.847.802,56	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah mencapai 91,923 %.

Capaian kinerja realisasi indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2025 sudah sesuai (*on the track*) untuk mencapai target optimis akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 serta akhir periode Renstra tahun 2025 – 2029 yang saat ini sudah mencapai sebesar 91,923 %.

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2025

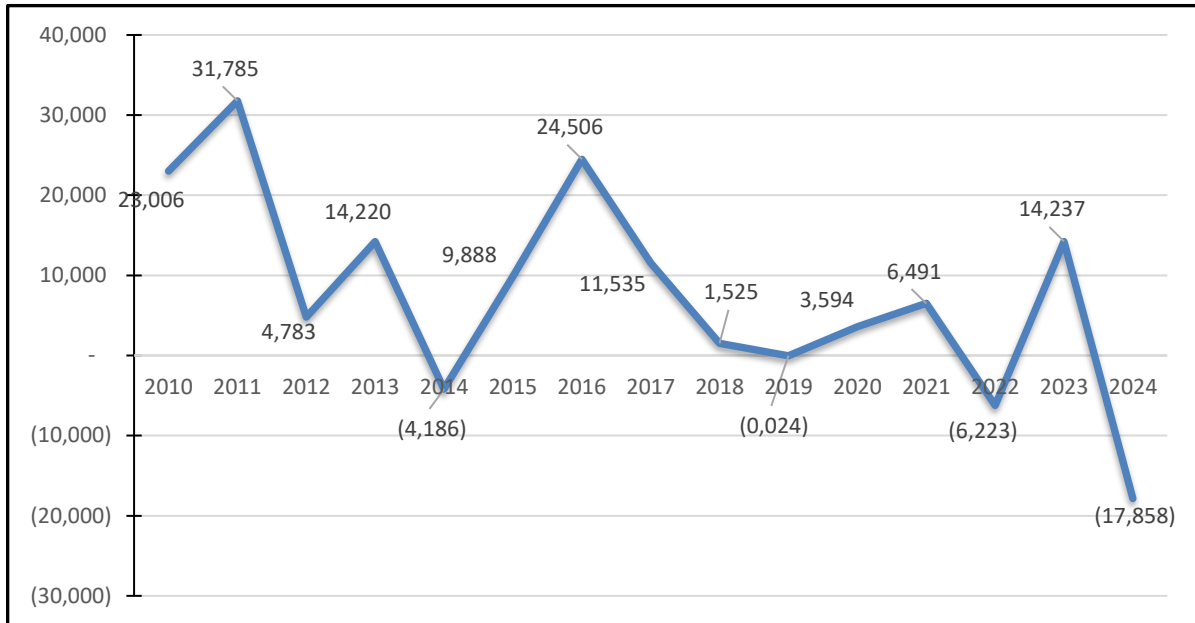
No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,478	0,520	91,923

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Tingkat kemajuan indeks kemandirian fiskal daerah pada tahun 2025 telah mencapai 91,923 % hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang ada.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka akan memberikan gambaran sebagai berikut:



Gambar 3.8

Grafik Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Sumsel dengan Tahun Sebelumnya

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan (IKSS.3) tahun 2025 terhadap rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Target RPJMD 2030	
1.	2024	10.962.497.244.934,05		(10,258)
2.	2025	9.837.929.951.702,67		
dst				
3.	2029		12.731.101.473.657,10	6,43
4.	2030		13.549.281.593.204,80	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel (2025)

Capaian realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2025, apabila dibandingkan dengan rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{[13.549.281.593.204,80 - 9.007.267.789.992,25]}{9.007.267.789.992,25} \times 100\% = 50,43\%$$

Tabel 3.32
Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	(10,258)	1,48	(5,5)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Kondisi realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kontraksi negatif, sehingga tingkat kemajuan dari periode akhir RPJMD tahun 2025 – 2029 dan periode akhir Renstra tahun 2025 – 2029 masih mengalami tingkat kemajuan yang negatif sebesar (5,5 %), hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

3.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pada 10 (sepuluh) daerah provinsi di Pulau Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa perbandingan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		2024	2025	
1.	Aceh	11.396.040.000.000,00	9.903.940.000.000,00	(13,0931)
2.	Sumatera Utara	13.236.899.906.825,00	8.614.057.090.921,30	(34,9239)
3.	Sumatera Barat	6.482.418.683.405,20	5.637.501.625.930,30	(13,0340)
4.	Riau	9.499.559.746.229,20	6.554.436.778.806,50	(31,0027)
5.	Jambi	4.725.732.848.352,30	3.704.748.654.518,60	(21,6048)
6.	Sumatera Selatan	10.962.497.244.934,50	9.837.929.951.702,67	(10,258)
7.	Bengkulu	3.191.854.148.850,30	2.395.349.147.541,50	(24,9543)
8.	Lampung	7.451.703.679.830,80	4.798.142.574.580,60	(35,6101)

9.	Kepulauan Riau	3.958.295.361.262,70	3.393.963.641.827,40	(14,2569)
10.	Kepulauan Bangka Belitung	2.421.902.411.336,70	1.879.328.194.638,70	(22,4028)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu (2025)

Melihat trend pertumbuhan pendapatan daerah secara year-on-year wilayah provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi pertumbuhan pendapatan negatif, dimana deviasi pertumbuhan negatif terendah berada pada Provinsi Lampung sebesar (35,6101 %) sementara pertumbuhan negatif tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Sumatera Selatan (10,258 %).

3.1.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tabel 3.34
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023
						Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengatikan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota	Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
						Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota	Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD
						Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan	Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah secara massif
						Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi	Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan
						Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah	Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa pemberian Dana Insentif Daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);
2. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
3. Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan;
5. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
7. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

Tabel 3.35
Faktor Penghambat dan Pendorong IKSS 3 Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	535.000.000	456.199.100	85,27	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota 3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	(8,14)	535.000.000	456.199.100	85,27	12,23 %

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.6.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

Tabel 3.37
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran IKSS 3 Terhadap Program kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			94,46	86,71	91,79	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	12,23
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		94,46	86,71	91,79	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	12,23
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				115.000.000,00	106.826.431,00	92,89	
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			93,64	91,92	98,16	5.398.909.010,00	3.139.393.968,00	58,15	12,23
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		94,62	89,70	94,80	5.398.909.010,00	3.139.393.968,00	58,15	12,23
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				397.825.000,00	362.778.919,00	91,19	
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				324.000.000,00	128.959.423,00	39,80	
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.188.000.000,00	337.286.895,00	28,39	
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.010.000.000,00	913.440.050,00	90,44	
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				737.500.000,00	290.596.984,00	39,40	
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				422.507.400,00	274.338.573,00	64,93	
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah				92.900.000,00	21.767.110,00	23,43	
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				496.581.260,00	358.325.750,00	72,16	
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				50.300.000,00	34.018.860,00	67,63	
		1.10	Penagihan Pajak Daerah				312.615.350,00	183.841.350,00	58,81	
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				27.000.000,00	11.720.204,00	43,41	
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				231.280.000,00	207.017.260,00	89,51	
		1.13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				83.000.000,00	15.302.590,00	18,44	
	JUMLAH						5.618.909.010,00	3.348.725.040,00	59,59	12,23

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.4.7 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Kinerja

Tabel 3.38
Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja IKSS 3 Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	(8,14)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

3.1.5 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

*".....Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi....."*

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntabel. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula

tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Formula Perhitungan IKSS.4:

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{k=1}^{i=18} (Pajak Daerah Provinsi + Pajak Daerah Kabupaten/Kota)}{Total PDRB} \times 100 \%$$

Dimana:

Pajak Daerah = Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Non Migas

3.1.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

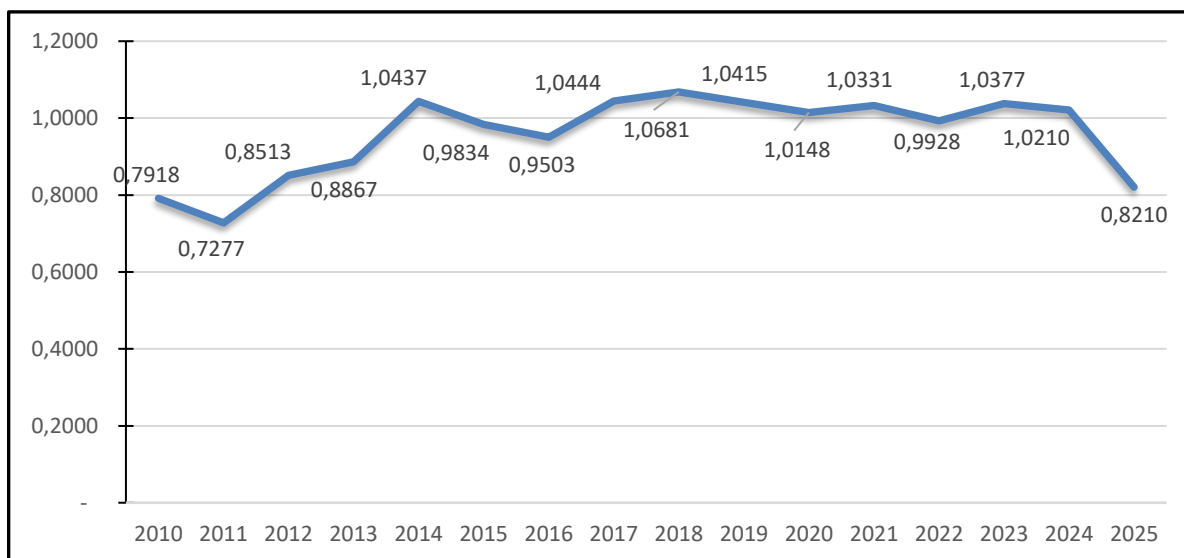
Pengukuran data kinerja dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKSS.4 tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.39

Pengukuran Data Kinerja dengan Perbandingan Antara target dan Realisasi IKSS.4 Tahun 2025

No.	Bulan	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB		
1.	Januari	415.317.380.972,18	56.936.149.266.666,70	0,729	1,25
2.	Februari	880.980.781.519,52	85.404.223.900.000,00	1,032	
3.	Maret	1.328.994.487.798,91	170.808.447.800.000,00	0,778	
4.	April	2.013.898.111.908,24	230.958.397.140.000,00	0,872	
5.	Mei	2.502.560.326.082,50	261.033.371.810.000,00	0,959	
6.	Juni	3.626.094.936.395,24	351.258.295.820.000,00	1,032	
7.	Juli	3.783.656.476.320,71	413.023.695.820.000,00	0,916	
8.	Agustus	4.338.198.733.887,11	443.906.395.820.000,00	0,977	
9.	September	4.980.079.723.928,71	536.554.495.820.000,00	0,928	
10.	Oktober	5.630.383.449.666,31	598.319.895.820.000,00	0,941	
11.	November	5.919.827.784.624,31	629.202.595.820.000,00	0,941	
12.	Desember	6.559.367.964.557,74	721.850.695.820.000,00	0,909	
	TAHUNAN	6.559.367.964.557,74	721.850.695.820.000,00	0,909	

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)



Gambar 3.9

Grafik Perbandingan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

- 3.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah**
 Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,909	1,27	71,57

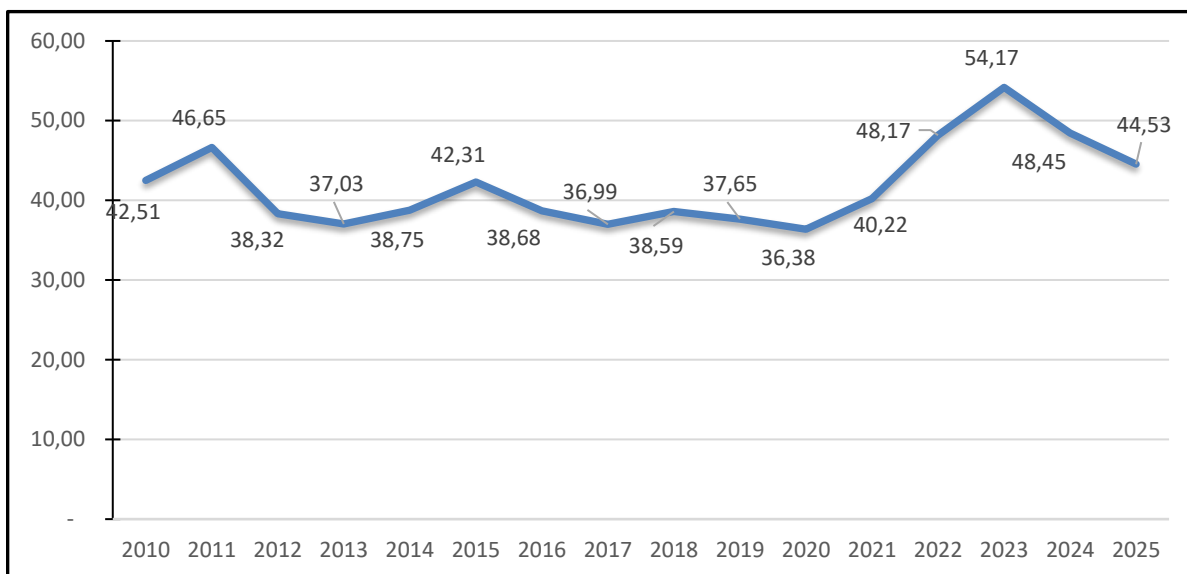
Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 71,57 %.

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 – 2025 menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan investasi yang semakin baik.

3.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:



Gambar 3.10

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025, apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.50

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	9.837.929.951.702,67	45,835
dst				
2.	2030	7.075.931.702.943,23	13.549.281.593.204,80	55,64

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 = $\frac{45,84}{55,64} \times 100 \% = 82,39 \%$

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,835	55,64	82,39

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dan Renstra tahun 2025 – 2029 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 82,39 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian tahun 2025 sesuai dengan *on the track* dari dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan kondisi bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,835 %, masih harus ditopang oleh sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan Sumatera Selatan

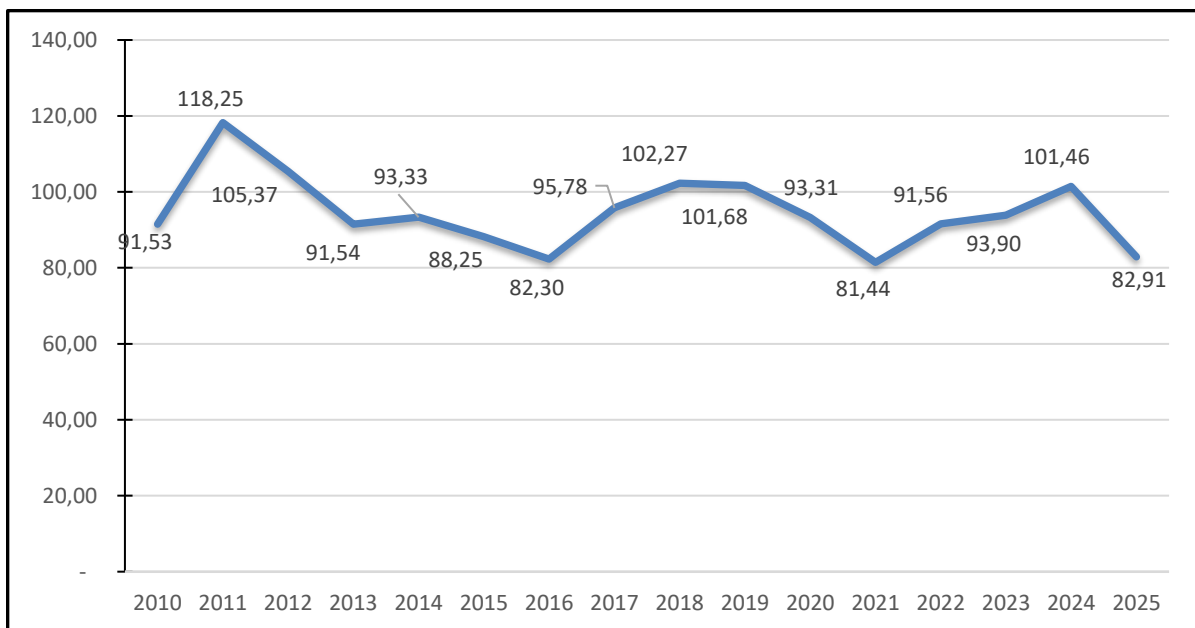
3.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi 2025		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	10.155.352.045.785,00	24,01
2.	Sumatera Utara	4.303.372.94.6127,30	8.614.057.090.921,30	49,95
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	5.637.501.625.930,30	43,62
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	6.554.436.778.806,50	50,35
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	3.704.748.654.518,60	43,93
6.	Sumatera Selatan	4.011.191.364.200,25	9.007.267.189.992,25	45,835
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	2.395.349.147.541,50	37,57
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	4.798.142.574.580,60	51,03
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	3.393.963.641.827,40	44,26
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	1.879.328.194.638,70	36,79

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu 2025



Gambar 3.11

Grafik Perbandingan Kinerja Pencapaian PAD Tahun 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD

3.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 Realisasi kinerja pencapaian PAD tahun 2025 dengan rencana target di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.60

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	4.838.287.154.591,00	93,198
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target PAD dalam RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan pada akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.61
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,198	N/A	N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

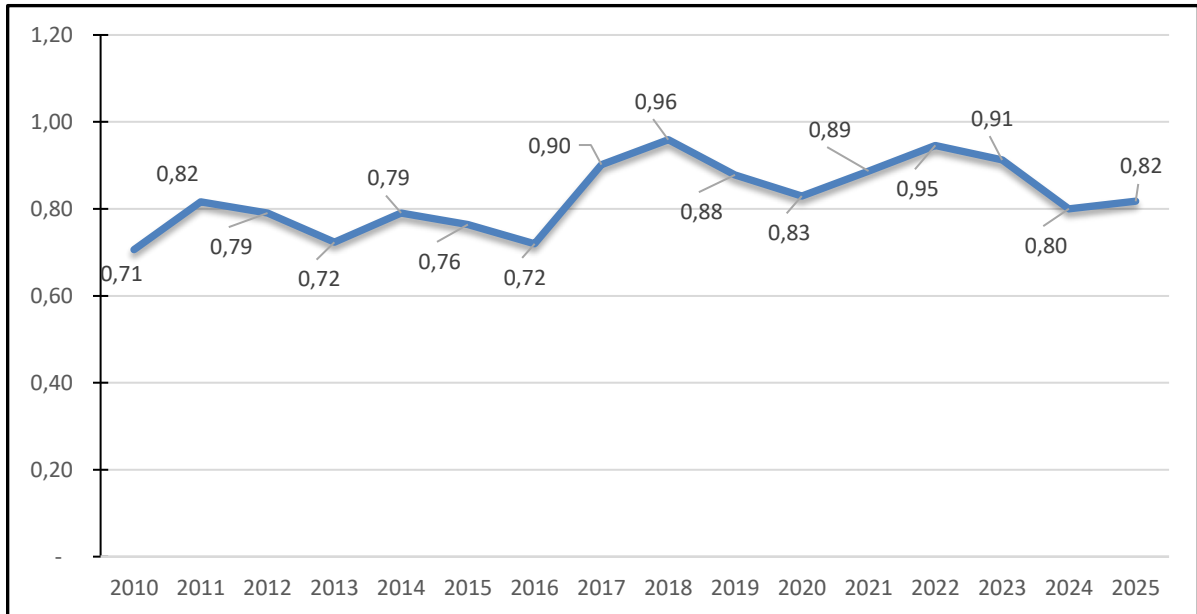
Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2025 apabila dibandingkan dengan pencapaian 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.62
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah 2025		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	2.859.122.172.935,00	85,29
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	6.419.301.627.754,00	67,04
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	2.807.443.163.516,00	87,59
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	5.200.915.848.254,00	63,45
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	2.074.503.864.666,00	78,45
6.	Sumatera Selatan	4.011.191.364.200,25	4.838.287.154.591,00	93,19
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	1.231.301.332.918,00	73,09
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	4.020.052.532.113,20	60,91
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	1.904.763.732.160,40	78,86
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	986.551.719.389,04	70,09

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu Sumsel 2025

Realisasi capaian kinerja PAD terhadap target tahun 2025 tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 93,198 % dan terendah pada Provinsi Lampung sebesar 60,91 %.



Gambar 3.12

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel dan BPS Sumsel

3.1.8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
 Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.70

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,682
dst				
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.71
Capaian Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,82	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

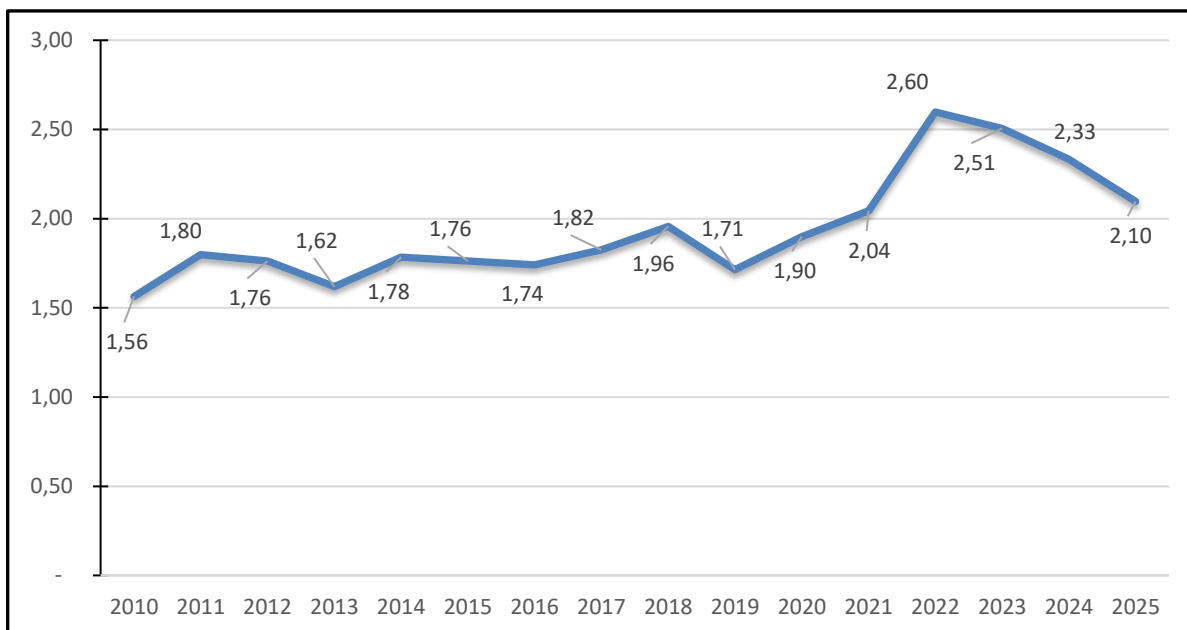
Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	243.202.090.000.000,00	1,00
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	1.146.919.760.000.000,00	0,38
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	332.936.440.000.000,00	0,74
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	1.112.481.620.000.000,00	0,30
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	322.975.530.000.000,00	0,50
6.	Sumatera Selatan	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,68
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	103.991.920.000.000,00	0,87
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	483.882.920.000.000,00	0,51
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	352.436.430.000.000,00	0,43
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	107.504.820.000.000,00	0,64

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terbesar pada Provinsi Aceh dengan nilai sebesar 1,00 %, sementara kontribusi terkecil pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar 0,38 %, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,682 %.

adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.13

Grafik Perbandingan Kontribusi PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2025 Terhadap Target dengan Tahun Sebelumnya

Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu

3.1.8.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029

Tabel 3.80

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tahun	Uraian		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	2025	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,26	2,10
	dst			
2.	2030			N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

Tabel 3.81
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025		Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3 9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB 1	Rasio PAD Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	2,097		N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Tahun 2025		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	1.203.761.666.666,67	2,03
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	1.406.190.882.352,94	3,06
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	1.086.127.500.000,00	2,26
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	1.951.934.615.384,62	1,69
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	1.142.010.833.333,33	1,43
6.	Sumatera Selatan	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,56	2,097
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	1.186.617.272.727,27	0,76
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	1.361.949.375.000,00	1,80
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	1.317.737.500.000,00	1,14
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	869.270.000.000,00	0,80

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,06, terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 0,76, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 2,097.